

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kalapas Purwokerto Koordinasi dengan Bupati Banyumas Bahas KUHP Baru

Narsono Son - PURWOKERTO.TELISIKFAKTA.COM

Mar 11, 2026 - 10:57



Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kalapas Purwokerto Koordinasi dengan Bupati Banyumas Bahas KUHP Baru

PURWOKERTO - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Purwokerto, Ali Andra Harahap bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas melaksanakan kunjungan koordinasi kepada Bupati Banyumas pada Rabu (11/3/2026) di Pendopo Bupati Banyumas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung implementasi kebijakan pemasyarakatan, khususnya terkait penerapan KUHP Baru.



Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, menyampaikan maksud kedatangan bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan Banyumas yaitu memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para penegak hukum di wilayah Banyumas.



FGD tersebut direncanakan membahas penerapan KUHP Baru, khususnya mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan.



“Melalui forum diskusi bersama para penegak hukum dan instansi terkait, kami berharap dapat menyamakan persepsi serta merumuskan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial agar dapat berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Aliandra Harahap.

Selain itu, Kalapas juga menyampaikan rencana program pembinaan berupa kegiatan kerja bakti warga binaan di kawasan Alun-Alun Purwokerto sebagai bagian dari program asimilasi. Program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab serta kepedulian sosial warga binaan sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik rencana koordinasi tersebut serta mendorong agar pihak Lapas segera mengajukan surat resmi terkait permohonan fasilitasi pelaksanaan FGD.

Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat diperoleh kesepakatan bersama mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial, termasuk penentuan lokasi kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah daerah.

(Humas Lapas Purwokerto)